

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2017**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan A. Majid Brangas Telepon (0361)224184 Fax.225368

KUALA TUNGKAL



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR. Wb.

Atas berkat rahmat Allah SWT Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017 ini dapat kami wujudkan sebagaimana mestinya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan perwujudan pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan serta tingkat kinerja yang dicapai dalam perwujudan pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan mengingat implementasi sistem akuntabilitas masih perlu penyempurnaan secara terus menerus, namun demikian telah diupayakan semaksimal mungkin melalui koordinasi antar instansi terkait dan diskusi bersama terhadap permasalahan yang memerlukan asistensi nara sumber, atas kekurangan tersebut kami mohon saran untuk penyempurnaan lebih lanjut.

Mudah-mudahan LAKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2017 dan dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan pada tahun berikutnya.

Kuala Tungkal, Pebruari 2018,
Kepala Dinas

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat,

Ir. H. ANDI AKHMAD NUZUL, ME
NIP. 19620221 199203 1 004

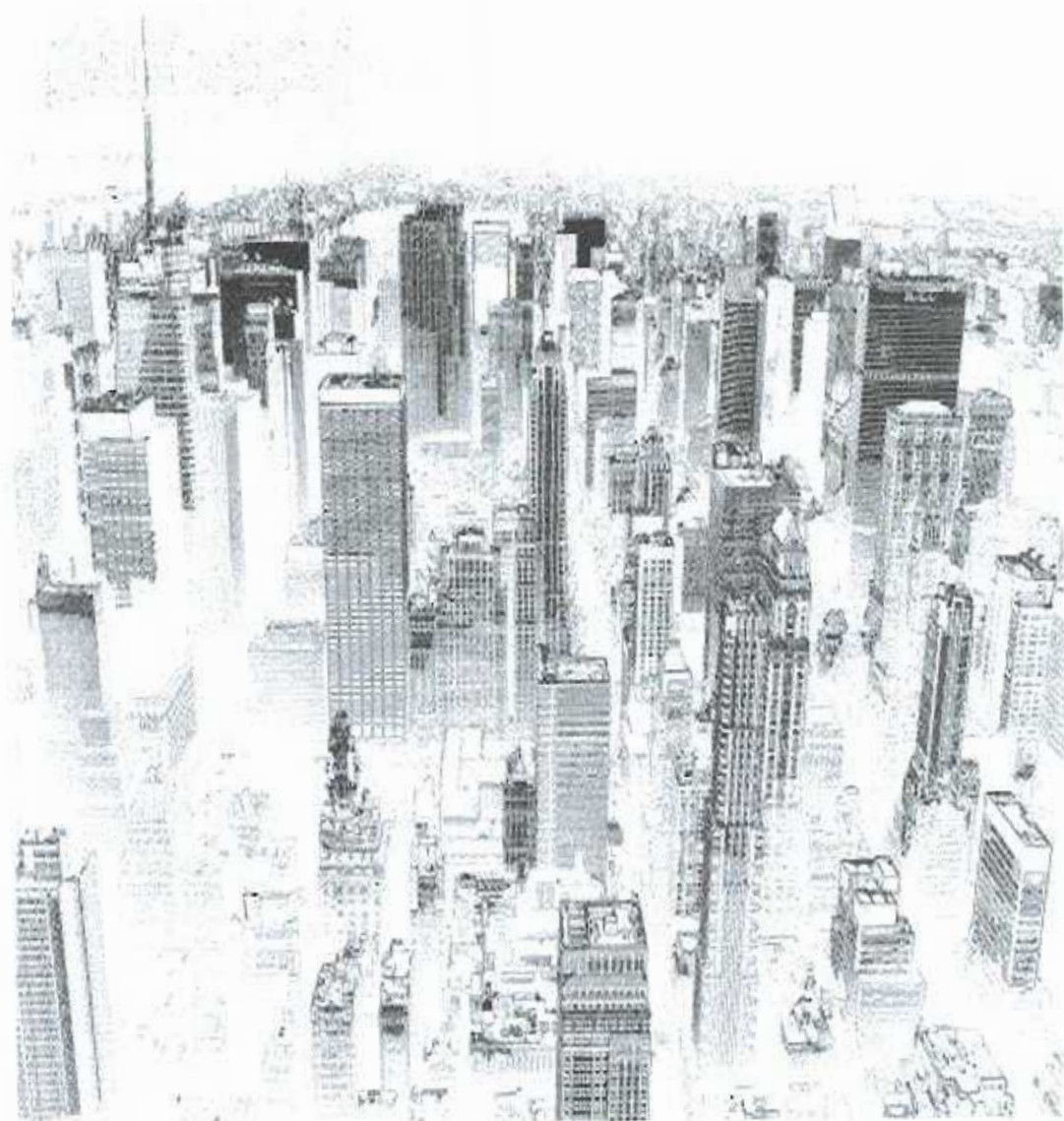


**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan A. Majid Brangas Telepon (0361)224184 Fax.225368

KUALA TUNGKAL



BAB . 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LaKIP).

LaKIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LaKIP akan diuraikan mengenai *history* suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berkewajiban menyusun LaKIP Tahun 2017 dan menyampaikan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LaKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut juga merupakan capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya.

Pada tahun 2017 ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 365.456.578.143.- untuk mewujudkan infrastruktur pelayanan dasar yang berkualitas, adapun program yang menjadi prioritas adalah Pembangunan Jalan dan Jembatan, serta peningkatan pelayanan air bersih serta dukungan sarana kesehatan yang dilakukan melalui pelaksanaan 16 program oleh Sekretariat dan 4 bidang.

Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mendukung visi Bupati yaitu Tanjung Jabung Barat yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat dan Berkualitas, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

1.2 Isu Strategis

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain pembangunan sarana dan prasarana di bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, infrastruktur permukiman (air minum, air limbah, penanganan kumuh) serta penataan ruang dan jasa konstruksi. Infrastruktur PUPR diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat, antara lain terciptanya konektivitas antara pusat-pusat kegiatan, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berusaha keras untuk dapat mewujudkan konektivitas antar wilayah serta terpenuhinya infrastruktur dasar berupa universal akses yaitu kebutuhan akan air minum.

Pembangunan jalan dan jembatan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan konektivitas. Dengan adanya peningkatan konektivitas, harga barang di seluruh wilayah relatif sama, serta wilayah yang relatif tertinggal dapat meningkatkan pertumbuhannya sehingga kesenjangan dapat dikurangi.

Sementara disebagian besar ibu kota Kabupaten dengan wilayah rawa gambut memiliki permasalahan tersendiri, yaitu hidup di lingkungan dengan kondisi sanitasi yang tidak layak dan sulit mengakses air bersih.

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah upaya mendukung kedaulatan pangan dengan melakukan peningkatan Pengelolaan Irigasi Teknis serta peningkatkan pengelolaan Daerah Irigasi Rawa.

Dari kondisi tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu *leading institution* dalam pembangunan infrastruktur mengemban tugas berat untuk meningkatkan keandalan infrastruktur PUPR dalam mewujudkan kedaulatan pangan, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur permukiman dan perumahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur telah menggerakkan ekonomi riil serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar khususnya di sektor jasa konstruksi. Tentunya hal tersebut menjadi tantangan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jasa Konstruksi dalam rangka menghadapi persaingan global.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.

1.4 Struktur Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 1 Sekretariat serta 4 bidang dengan rincian terlampir.

Selanjutnya uraian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, masing-masing sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

- a. Merumuskan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan jasa konstruksi.
- e. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

- a. Koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kegiatan dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja.
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan ketatausahaan meliputi kerumahtanggaan, kepegawaian penatausahaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan keungan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, ferifikasi, dan tindak lanjut LHP.
- d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Sumber Daya Air

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang sumber daya air.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan jaringan irigasi dan rawa serta pengelolaan irigasi dan rawa;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, rehabilitasi, normalisasi dan peningkatan saluran sungai dan drainase primer;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi operasi dan pemeliharaan sumber daya air, pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, pengawasan dan pengendalian pembangunan sumber daya air, pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten;
- e. Melakukan bimbingan teknis terhadap penggunaan dan pengelolaan air tanah dan permukaan;
- f. Pengendalian daya rusak air yang berdampak pada skala Kabupaten;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Bina Marga

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang bina marga.
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan peralatan laboratorium, penyewaan alat berat, dan pengujian laboratorium atas tanah, beton dan aspal;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemeliharaan rutin, berkala jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan survey untuk mengetahui kondisi jalan kabupaten;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Cipta Karya

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang cipta karya
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penyusunan perencanaan dan pengendalian bidang cipta karya, serta pendataan sarana dan prasarana keciptakarya.
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembangunan, air minum pembangunan sistem penyediaan air minum, dan meningkatkan cakupan pelaksanaan air minum berbasis masyarakat.
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Kesehatan Lingkungan Permukiman dan Tata Bangunan.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan terkait tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi

- a. Penyusunan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan ruang dan jasa konstruksi;
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan pengawasan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pengaturan tata ruang, menyiapkan dokumen RDTR pada setiap kawasan strategis kabupaten;
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, strategi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- d. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan, pengaturan dan pemberdayaan jasa konstruksi, pelatihan tenaga kerja terampil jasa konstruksi, pembinaan badan usaha jasa konstruksi dan pemberian rekomendasi izin usaha jasa konstruksi;
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Kondisi Aset dan Sumber Daya Manusia

a. Kondisi Aset

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, saat ini di dukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang baik untuk menunjang operasionalisasi kegiatan rutin dinas maupun operasionalisasi kegiatan lapangan. Secara lebih rinci kondisi aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat per Desember 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Tanah	10.765.998.962,56
2	Peralatan dan Mesin	18.064.981.812,67
3	Gedung dan Bangunan	269.558.271.776,88
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	2.328.180.500.659,03
5	Aset Tetap Lainnya	2.200.820.500
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	307.236.533.418
7	Aset Lainnya	1.393.290.000
TOTAL ASET		2.937.400.397.129

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2017

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung jabung Barat berdasarkan data kondisi terakhir (Desember 2017) sebanyak 127 orang dengan rincian 53 orang berstatus PNS, dan 74 orang berstatus Pegawai Honor Daerah.

Untuk komposisi Pegawai Negeri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017 berdasarkan pangkat/golongan dan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017

Jumlah Pegawai	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat/Golongan	Pejabat Struktural	Pejabat Fungsional
3 Org	Strata 2	Pembina Utama Muda / Ivc	Kepala Dinas	
2 Org	Strata 1	Pembina UTK. I /IVb	Sekretaris	Pelaksana Administrasi

1 Org	Strata 2	Penata TK. I / III d	Kasi	
2 Org	Strata 1	Penata Tingkat I / III d	Kabid	Pelaksana Administrasi
3 Org	SMA	Penata TK. I / III d	Kasi	
1 Org	Strata 2	Penata / III c	Kasi	
1 Org	Strata 1	Penata / III c	Kabid	
3 Org	Strata 1	Penata / III c	Kasi	
1 Org	SMA	Penata / III c	Kasi	
4 Org	Strata 1	Penata Muda TK. I / III b	Kasi	
1 Org	SMA	Penata Muda TK. I / III b	Kasi	
6 Org	SMA	Penata Muda TK. I / III b		Pelaksana
2 Org	Strata 1	Penata Muda TK. I / III b		
12 Org	Strata 1	Penata Muda / III a		
2 Org	Diploma III	Penata Muda		
2 Org	Diploma III	Pengatur TK. I		
1 Org	Diploma III	Pengatur		
3 Org	SMA	Pengatur		
3 Org	SMA	Pengatur Muda TK. I		
1 Org	SMA	Pengatur Muda		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2017

1.6 Landasan Hukum

1. Undang Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja, dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 54 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2016, Nomor 54);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tahun Anggaran 2017, Nomor38):



BAB . 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan ini, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misi yang diemban untuk kurun waktu lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan ini juga akan memungkinkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai, mengingat tujuan organisasi dirumuskan berdasarkan visi misi tersebut.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Jaringan jalan dan jembatan yang berkualitas yang menghubungkan seluruh wilayah.
2. Terwujudnya pelayanan air minum dan air bersih yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Terwujudnya kondisi lingkungan yang memenuhi persyaratan kesehatan.
4. Terwujudnya peningkatan produktifitas pertanian.
5. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
6. Terwujudnya Penyedia Jasa Konstruksi yang handal.

Sasaran organisasi merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja.

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas jaringan dan jembatan yang berkualitas yang menghubungkan seluruh wilayah.
2. Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan.
3. Meningkatnya Pelayanan Sanitasi masyarakat perkotaan.
4. Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan
5. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan yang berlaku.
6. Meningkatnya Kualitas Penyedia Jasa Konstruksi.

2.1.2. Strategi dan Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

Strategi yang akan dirumuskan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang berkualitas dan menghubungkan semua wilayah.
2. Merencanakan Revitalisasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan SPAM IKK dan SPAM BJP Perdesaan.
3. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Pengelolaan Air Limbah, Drainase dan Persampahan.
4. Merencanakan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Teknis dan Rawa yang tepat guna.
5. Melakukan penyusunan Rencana Tata Ruang, Meningkatkan Sosialisasi dan Pembinaan, serta melakukan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Meningkatnya profesionalisme penyedia jasa konstruksi dan tenaga teknis.

6. Sasaran Strategis

Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kualifikasi

Indikator Kinerja Utama (IKU) 8

Persentasi Penyedia Jasa Konstruksi Memenuhi Standar Kualifikasi



Target kinerja persentase penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar kualifikasi adalah 45% dengan realisasi kinerja adalah 41 % dengan capaian 108 %. Capaian ini dikategorikan sangat baik. Capaian ini tidak dapat dibandingkan dengan indikator pada tahun 2016 karena kewenangan ini merupakan kewenangan

INDIKATOR KERJA UTAMA
baru di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas Keuangan menyajikan alokasi anggaran dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugas lainnya. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017, besarnya alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 360.255.974.750,- sedangkan untuk gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp. 5.200.592.500,- sehingga total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 365.456.578.143,- dengan tingkat capaian penggunaan dana sebesar Rp. 338.031.739.880,98 (92,50 %) dengan rincian sebagai berikut :

- A. Belanja Tidak Langsung dengan total anggaran sebesar Rp. 5.200.592.500,- direalisasi sebesar Rp. 3.572.557.315,- (69 %).
- B. Belanja Langsung dengan total anggaran sebesar Rp 360.255.974.750,- direalisasi sebesar Rp. 334.459.182.565,98 (92,84 %)

Dari rincian Belanja langsung diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

I. BAGIAN SEKRETARIAT

Bagian Sekretariat melaksanakan 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 2.465.479.893,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.871.095.319,- (75,89%) dengan 17 Kegiatan, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.350.000,- atau sebesar 90,00 %.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 303.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 194.523.023,- atau sebesar 64,20 %.
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan anggaran sebesar Rp 278.170.000,- dan realisasi sebesar Rp. 273.570.000,- atau 98,35 %.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dengan anggaran sebesar Rp 8.508.693,- dan realisasi sebesar Rp. 8.508.693,- atau 100 %.
- Penyediaan Alat Tulis Kantor, dengan anggaran sebesar Rp 118.313.200,- dan realisasi sebesar Rp. 118.304.200,- atau 99,99 %.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan anggaran sebesar Rp. 13.625.000,- dan realisasi sebesar Rp. 13.625.000,- atau 100,00 %.
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 203.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 202.810.000,- atau 95,54 %.
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undang dengan anggaran

sebesar Rp. 11.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 8.465.000,- atau 76,95 %.

- Penyediaan Makanan dan Minum dengan anggaran sebesar Rp. 4.200.000,- dan realisasi sebesar Rp. 2.400.000,- atau 57,14 %.
- Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 400.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 256.133.671,- atau 64,03 %.
- Pengelola Aset dengan anggaran sebesar Rp. 209.400.000,- dan realisasi sebesar Rp. 163.545.000,- atau 78,10 %.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 206.500.000,- dan realisasi sebesar Rp. 206.288.000,- atau sebesar 99,90 %.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 124.730.000,- atau sebesar 99,78 %.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional dengan anggaran sebesar Rp. 323.880.000,- dan realisasi sebesar Rp. 128.829.982,- atau sebesar 39,78 %.
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 45.250.000,- dan realisasi sebesar Rp. 42.762.750,- atau sebesar 94,50 %.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan anggaran sebesar Rp. 34.125.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.125.000,- atau sebesar 100,00 %.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

- Bimbingan Teknis dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.125.000,- atau sebesar 100,00 %.

5. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

- Pembangunan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 127.570.270.000,- dan realisasi sebesar Rp. 122.125.344.374,99,- atau sebesar 95,73 %.

II. BAGIAN BINA MARGA

Bagian Bina Marga melaksanakan 2 (dua) program dengan total anggaran sebesar Rp. 251.655.140.250,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 230.950.667.198,- (91,77 %) dengan 8 Kegiatan, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan :

- Pembangunan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 127.570.270.000,- dan realisasi sebesar Rp. 122.125.344.374,99,- atau sebesar 95,73 %.
- Perencanaan dan Pengawasan Peningkatan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 7.268.870.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.593.136.980,- atau sebesar 90,70 %.
- Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.778.670.000,- dan realisasi sebesar Rp. 34.125.000,- atau sebesar 97,760%.
- Pembangunan Jalan Baru dengan anggaran sebesar Rp. 6.145.460.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.043.703.400,- atau sebesar 98,34 %.
- Peningkatan Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 64.937.870.000,- dan realisasi sebesar Rp. 55.844.529.836,- atau sebesar 86,13 %.
- Pemeliharaan Berkala Jalan dengan anggaran sebesar Rp. 10.407.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 10.228.377.000,- atau sebesar 98,28 %.
- Peningkatan Jalan (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 27.647.000.250,- dan realisasi sebesar Rp. 22.447.531.000,- atau sebesar 81,19 %.

2. Program Peningkatan Sarana Kebinamargaan :

- Pengadaan Alat – alat Berat dengan anggaran sebesar Rp. 3000.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. 32.996.266.581,- atau sebesar 99,88 %.

III. BAGIAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Sumber Daya Air melaksanakan 1 (satu) program dengan total anggaran sebesar Rp. 18.836.868.500,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.276.117.393,- (97 %) dengan 3, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya :

- Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 542.212.200,- dan realisasi sebesar Rp. 489.575.658,- atau sebesar 90,29%.
- Peningkatan Jaringan Irigasi dengan anggaran sebesar Rp. 11.950.100.000,- dan realisasi sebesar Rp. 11.584.803.735,- atau sebesar 96,94 %.
- Peningkatan Irigasi (DAK) dengan anggaran sebesar Rp. 6.344.556.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.201.738.000,- atau sebesar 97,75 %.

IV. BAGIAN CIPTA KARYA

Bagian Cipta Karya melaksanakan 5 (lima) program dengan total anggaran sebesar Rp. 85.354.810.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 81.945.550.309,9,- (96 %) dengan 6 Kegiatan, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- Pembangunan Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 44.457.300.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.707.543.999,- atau 98,31 %.
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 6.107.800.000,- dan realisasi sebesar Rp. 6.026.946.300,- atau sebesar 98,68 %.

2. Program Penyediaan dan pengolahan Air Baku :

- Pendampingan PAMSIMAS dengan anggaran sebesar Rp. 122.525.000,- dan realisasi sebesar Rp. 67.296.210,- atau sebesar 54,92 %.

3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum :

- Revitalisasi dengan anggaran sebesar Rp. 34.296.385.000,- dan realisasi sebesar Rp. 31.810.643.800,- atau sebesar 92,75 %.

4. Program Pengembangan Data dan Informasi :

- Penyusunan RP12JM dengan anggaran sebesar Rp. 296.350.000,- dan realisasi sebesar Rp. 280.075.000,- atau sebesar 94,51 %.

5. Program Pengembangan Perumahan :

- Pengawasan dengan anggaran sebesar Rp. 74.450.000,- dan realisasisebesar Rp. 53.045.000,- atau sebesar 71,25 %.

V. BAGIAN PENATAAN RUANG DAN JASA KONSTRUKSI

Bagian Penataan Ruang dan Jasa Konstruksi melaksanakan 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp. 1.943.695.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.415.752.345,- (73 %) dengan 6 Kegiatan, berikut rincian pagu dan realisasi anggaran Program dan kegiatan tersebut :

1. Program Perencanaan Tata Ruang :

- Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang (KLHS-RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 486.290.000,- dan realisasi sebesar Rp. 446.567.100,- atau sebesar 91,83 %.
- Penyusunan Rencana Deetail Tata Ruang (RDTR) dengan anggaran sebesar Rp. 624.025.000,- dan realisasi sebesar Rp. 560.477.000,- atau sebesar 89,82 %.

2. Program Pemanfaatan Ruang :

- Fasilitas Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemanfaatan Ruang dengan

anggaran sebesar Rp. 188.730.000,- dan realisasi sebesar Rp. 105.215.000,- atau sebesar 55,75 %.

3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang :

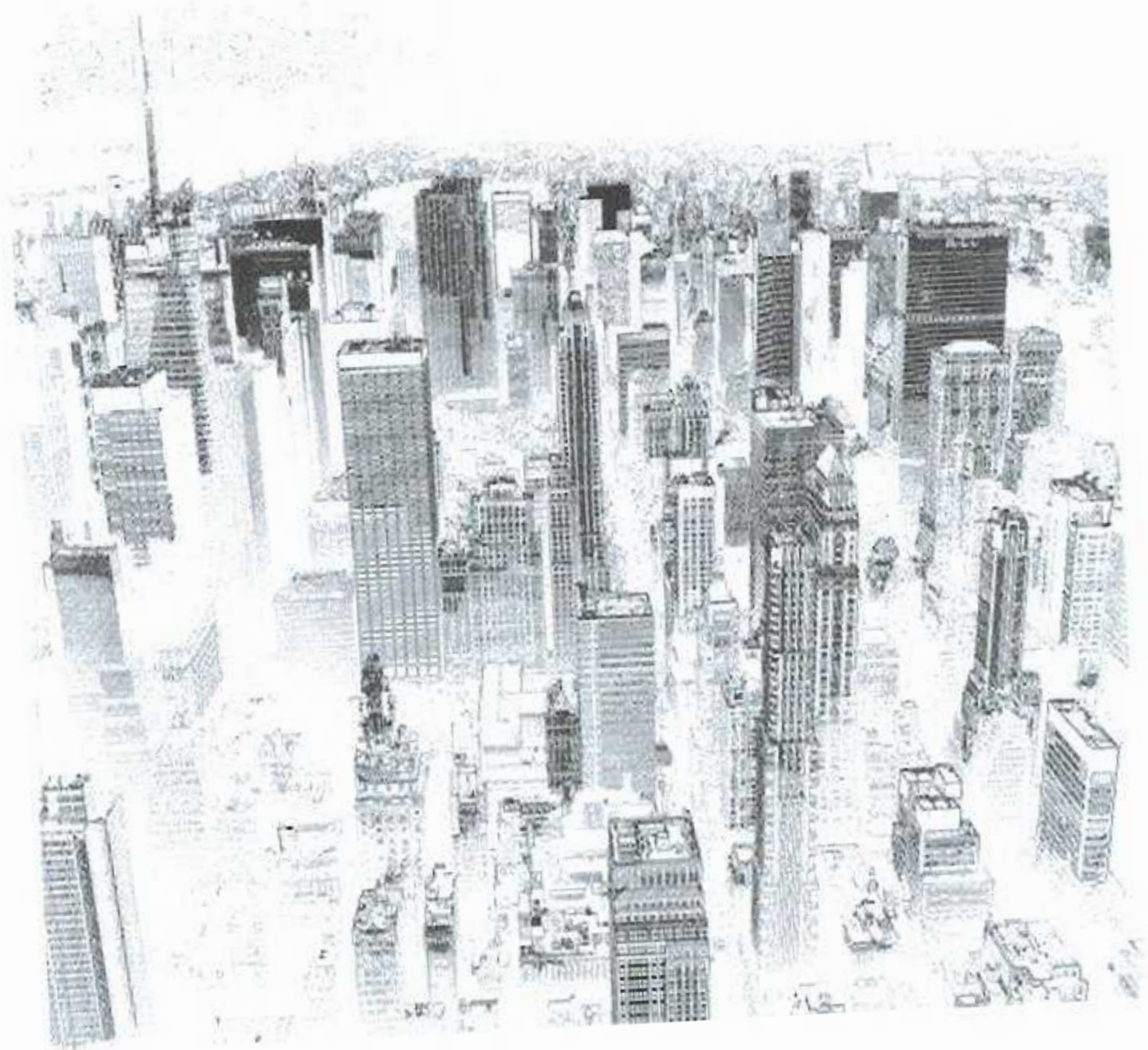
- Pengawasan Pemanfaatan Ruang dengan anggaran sebesar Rp. 265.240.000,- dan realisasi sebesar Rp. 104.287.245,- atau sebesar 39,32%.

4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan :

- Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dengan anggaran sebesar Rp. 98.280.000,- dan realisasi sebesar Rp. 43.731.000,- atau sebesar 44,50 %.
- Peningkatan Kapasitas Tenaga Terampil Jasa Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp. 281.130.000,- dan realisasi sebesar Rp. 155.475.000,- atau sebesar 55,30 %.

Realisasi Anggaran berdasarkan belanja adalah sebagai berikut

No	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Sisa
1	Belanja Tidak Langsung	5.200.592.500,-	3.572.557.315,-	68,70	1.628.035.185,-
2	Belanja Langsung	360.255.985.643,-	334.459.182.565,98	92,84	25.796.803.077,02
	a. Belanja Pegawai	1.088.470.000,-	993.720.000,-	91,30	94.750.000,-
	b. Belanja Modal	355.485.673.750,-	331.008.800.553,-	93,11	24.476.873.196,02
	c. Belanja barang dan jasa	3.681.841.893,-	2.456.662.012,-	66,72	1.225.179.881,-
	TOTAL PUPR	365.456.578.143,-	338.031.739.880,98	92,50	27.424.838.262,02



BAB . 4

PENUTUP



PENUTUP

BAB

4

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2017 merupakan wujud pertanggung jawaban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam mengelola kewenangan yang diberikan, juga berfungsi sebagai sarana/media introspeksi bagi seluruh jajaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam penilaian kinerja pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini, dilakukan pengukuran kinerja terhadap penetapan kinerja yang telah dibuat. Berdasarkan Penetapan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2017, telah ditetapkan 8 (delapan) Indikator Kinerja dari 6 (enam) sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dari hasil analisa dan pengukuran capaian kinerja di tahun 2017, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah cukup berhasil mencapai sasaran dimaksud berdasarkan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya.

Tabel Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	Capaian
1	Meningkatnya penanganan kualitas jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan semua wilayah	1. Panjang pembangunan jalan. 2. % panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang	12 Km 45,00%	21,725 40%	181,04 % 97,78 %
2	Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan	Jumlah Kecamatan teraliri air irigasi	13 Kec	13 Kec	100 %
3	Meningkatnya pelayanan sanitasi masyarakat perkotaan	Pengurangan luasan genangan diparkotaan nasional	26 ha	10 Ha	35,71 %
4	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan	Persentase kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih	62 %	53,86 %	86,84 %
5	Meningkatnya Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan berlaku	1. % Rekomendasi IMB dipatuhi. 2. Jumlah peraturan dan kebijakan tata ruang	100 % 1 Dokumen	100 % 75 %	100 % 75 %
6	Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	45,00%	45%	100 %

Dari Tabel diatas terlihat terdapat indikator *% panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang* pada tahun ini hanya tercapai 97,78 %, pencapaian akan terus kami optimalkan pada tahun mendatang sementara itu indikator *kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih* juga belum mampu kami penuhi dikarenakan revitalisasi yang dilakukan belum tuntas untuk memfungsikan seluruh jaringan yang telah ada, direncanakan beberapa wilayah kecamatan lain akan dapat mengakses jaringan air bersih pada tahun 2018.

Untuk indikator *Jumlah peraturan kebijakan tata ruang* hingga akhir tahun anggaran telah tersusun dokumen Materi Teknis dan Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya akan diusulkan menjadi Raperda,

Dari Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2017, besarnya alokasi dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebesar Rp. 360.255.974.750,- sedangkan untuk gaji dan tunjangan lainnya sebesar Rp. 5.200.592.500,- sehingga total anggaran yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 365.456.578.143,- dengan tingkat capaian penggunaan dana sebesar Rp. 338.031.739.880,98 (92,50 %) dengan rincian sebagai berikut :

- A. Belanja Tidak Langsung dengan total anggaran sebesar Rp. 5.200.592.500,- direalisasi sebesar Rp. 3.572.557.315,- (69 % pagu).
- B. Belanja Langsung dengan total anggaran sebesar Rp 360.255.974.750,- direalisasi sebesar Rp. 334.459.182.565,98 (92,84 % pagu)

Dari total Belanja langsung sebesar Rp 360.255.974.750,- direalisasi sebesar Rp. 334.459.182.565,98 (92,84 % pagu), alokasi ini digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur Jalan dan jembatan, Air Bersih, Fasilitas Umum, Fasilitas Kesehatan, Prasarana fisik pemerintahan, Peningkatan dan Pemeliharaan Daerah Irigasi Teknis dan Rawa, Penyusunan Dokumen Perencanaan teknis, lingkungan dan Pelaksanaan Pengawasan. Serta Pembebasan lahan.

Untuk bahan evaluasi pada tahun anggaran berikutnya dalam rangka meningkatkan eksistensi dan optimalisasi peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai salah satu unsur pelaksana pembangunan khususnya di bidang pekerjaan umum di daerah, maka dipandang perlu dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja untuk memenuhi perbaikan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya yaitu :

1. Idealnya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah kegiatan yang telah memiliki dokumen perencanaan teknis yang telah dibuat di tahun anggaran sebelumnya, sehingga penganggaran kegiatan dapat lebih terencana dan terukur sehingga output kegiatan dapat mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan

2. Optimalisasi fungsi kontrol dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan hendaknya sedini mungkin dapat dilakukan upaya-upaya pemecahan terhadap program dan kegiatan-kegiatan yang di nilai akan terhambat pelaksanaannya, sebaiknya sudah dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan kegiatan,.
3. Meningkatkan koordinasi secara intern, sektoral, maupun lintas sektor secara berkala sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja untuk selanjutnya dapat diambil langkah dan staretegi untuk meminimalisir dan mengatasi permasalahan yang dihadapi, sehingga nantinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat berperan secara lebih baik, optimal dan profesional dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini semoga dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi penting untuk mengetahui peran dan menilai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat, laporan akuntabilitas ini dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada, dan dengan demikian dapat dimanfaatkan untuk proses perencanaan selanjutnya.

Selain itu, diharapkan hasil evaluasi kinerja Tahun Anggaran 2017 akan memberikan kontribusi positif bagi pelaksanaan program/kegiatan pada tahun yang akan datang, yang akan dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**LAKIP**) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2018.



LAMPIRAN

Lampiran : 3
Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Kinerja pada Tahun Ke-					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)	
				2016	2017	2018	2019	2020		2021
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	%	41	42	45	55	58	59	62	62 %
2	Jalan Konektivitas yang terbangun	Km	16,70	0	12	12	11	10	11	56 Km
3	Persentase Kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih	%	0	53	62	70	84	92	100	100 %
4	Berkurangnya Luasan Genangan di Perkotaan	Ha	0	110 Ha	28 Ha	28 Ha	28 Ha	28 Ha	28 Ha	100 %
5	Persentase rekomendasi IMB dipatuhi	%	1834		100	100	100	100	100	2834 Izin
6	Jumlah kecamatan teraliri air irigasi	Kec	0	13	13	13	13	13	13	13 Kec
7	Jumlah Peraturan dan Kebijakan Tata Ruang	Peraturan/kebijakan	3		1	4	2	2	1	13 Peraturan/Kebijakan
8	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	30	40	45	50	55	60	65	65 %



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG**

Jalan A. Majid Brangas Ka. Tungal No. telp (0742) 323538
KUALA TUNGKAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang Efektif, Transparan, dan Akuntabel serta Berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. H. Andi Akhmad Nuzul, ME**

Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tanjung Jabung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. Ir. H. Safrial, MS**

Jabatan : Bupati Kab. Tanjung Jabung Barat

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Tungkal, **NDV** 2017

Pihak Kedua

Dr. Ir. H. Safrial, MS

Pihak Pertama



Ir. H. ANDIAKHMAD NUZUL, ME

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19620221 199203 1 004

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan. Konektifitas Yang menghubungkan semua wilayah	1. Panjang Pembangunan Jalan Konektifitas 2. Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	12 km 45 %
2.	Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan	Jumlah kecamatan teraliri air irigasi	13 Kecamatan
3.	Meningkatnya pelayanan sanitasi masyarakat perkotaan	Berkurangnya luasan genangan diperkotaan	28 Ha
4.	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan	Persentase kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih	62 %
5.	Meningkatnya kesesuaian pemamfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendaliannya sesuai peraturan yang berlaku	Persentase rekomendasi IMB dipatuhi	100 %
		Jumlah peraturan dan kebijakan tata ruang	1 peraturan/kebijakan
6.	Meningkatnya kualitas penyedia jasa konstruksi	Persentase penyedia jasa konstruksi memenuhi standar kualifikasi	45 %

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.550.716.893,00	APBD dan APBD- P
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 51.265.730.000,00	APBD dan APBD- P
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 34.125.000,00	APBD dan APBD- P
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Rp. 50.000.000,00	APBD dan APBD- P
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 130.000.000,00	APBD dan APBD- P
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 248.655.140.250,00	APBD dan APBD- P
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Rp. 3.000.000.000,00	APBD-P
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan	Rp. 18.836.868.500,00	APBD dan APBD- P
9. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	Rp. 122.525.000,00	APBD dan APBD- P
10. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Rp. 34.296.385.000,00	APBD dan APBD- P
11. Program Pengembangan Data dan Informasi	Rp. 296.350.000,00	APBD dan APBD- P
12. Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 1.110.315.000,00	APBD dan APBD- P
13. Program Pemamfaatan Ruang	Rp. 188.730.000,00	APBD dan APBD- P
14. Program Pengendalian Pemamfaatan Ruang	Rp. 265.240.000,00	APBD dan APBD- P
15. Program Pengembangan Perumahan	Rp. 74.450.000,00	APBD dan APBD- P
16. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Rp. 379.410.000,00	APBD dan APBD- P
TOTAL	Rp. 360.255.985.643,00	

Kuala Tungkal,

2017

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT



Dr. Ir. H. Safrial, MS

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT



Ir. H. ANDI AKHMAD NUZUL, ME

Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19620221 199203 1 004

Lampiran 5
PENGUKURAN KINERJA 2016 dan 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA PERIODE AKHIR RPJMD		2016				2017					
				TARGET VOL	TARGET SATUAN	TARGET VOL	TARGET SATUAN	REALISASI VOL	REALISASI SATUAN	CAPAIAN (%)	TARGET VOL	TARGET SATUAN	REALISASI VOL	REALISASI SATUAN	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan konektivitas yang menghubungkan semua	1	1. Panjang Pembangunan Jalan	56	km	0	km	0	km	0	km	0	km	185,04	Kriteria Nilai Sangat Baik
2	Tejarnya aliran air ingasi untuk pemukiman rakyat di semua kecamatan	2	2. % jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	62	%	42	%	42	%	100	%	46	%	97,78	Sangat Baik
3	Meningkatnya pelayanan sanitas masyarakat perkotaan	3	Jumlah kecamatan terasiri air ingasi	13	Kec	13	Kec	13	Kecamatan	100	%	13	Kecamatan	100,00	Sangat Baik
4	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perkapita	4	Pengurangan luasan genangan dipersikaban	250	Ha	111	Ha	110	Ha	100	%	10	Ha	95,71	Sangat Buruk
5	Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perkapita	5	% kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih	100	%	53	%	53	%	100	%	7	Kecamatan	53,85	Tinggi
6	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan pengendalian wa assual perubahan peraku	6	% rako rendas MB	2830	lbrn	0	lbrn	0	lbrn	0	lbrn	216	lbrn	108,00	Sangat Baik
7		7	Jumlah peraturan dan kebijakan teknis ruang	13	Peraturan	0	Peraturan	0	Peraturan	0	Peraturan	1	Peraturan	100,00	Rendah
8	Meningkatnya kualitas penyediaan jasa konstruksi	8	% penyelesaian konstruksi memenuhi standar kualitas	85	%	40	%	40	%	100	%	41	Orang	91,11	Sangat Baik

Jalan TMO dan Jalan Perayungan

Hasil Survey Kondisi Jalan

Data SDA

Delimitasi Luas Genangan yang terserang

Jumlah kecamatan yang telah memiliki akses air bersih perkapita

Jumlah Rekomendasi MB = 216

1 Laporan RDT; Kec. Tebing Tinggi

Jumlah Tenaga Terlatih: 75 orang

Lampiran 6 :
Indikator dan Rencana Pencapaian RPJMD
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2016)	Target Kinerja pada Tahun Ke-						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2021)
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatnya kualitas jaringan jalan dan jembatan. Konektivitas Yang menghubungkan semua wilayah	Persentase jalan dan jembatan dalam kondisi baik dan sedang	%	41	42	45	55	58	59	62	62 %
	Jalan Konektivitas yang terbangun	Km	16,70	0	12	12	11	10	11	56 Km
Meningkatnya aksesibilitas dan pelayanan air bersih perpipaan	Persentase Kecamatan yang mendapatkan aksesibilitas dan layanan air bersih	%	0	53	62	70	84	92	100	13 kec
Meningkatnya pelayanan sanitasi masyarakat perkotaan	Berkurangnya Luasan Genangan di Perkotaan	Ha	0	110 Ha	28 Ha	28 Ha	28 Ha	28 Ha	28 Ha	250 Ha
Terjaminnya aliran air irigasi untuk pertanian rakyat di semua kecamatan	Jumlah kecamatan teraliri air irigasi	Kec	0	13	13	13	13	13	13	13 Kec
Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan penegdalannya sesuai peraturan berlaku.	Persentase rekomendasi IMB dipatuhi	%	1834		100	100	100	100	100	2834 Izin
	Jumlah Peraturan dan Kebijakan Tata Ruang	Peraturan /kebijakan	3		1	4	2	2	1	13 Peraturan /Kebijakan
Meningkatnya kualitas Penyedia Jasa Konstruksi.	Persentase Penyedia jasa Konstruksi memenuhi standar kualifikasi	%	30	40	45	50	55	60	65	65 %

Sumber : Renstra Dinas PUPR Tahun 2016-2021

Lampiran 7

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2016 dan 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2016		REALISASI 2016		ANGGARAN 2017			REALISASI 2017	
				Keuangan	%	APBD	APBD-P	Keuangan	%	
1	Program layanan administrasi perkantoran	809.020.410		751.422.450	92,88	1.246.636.893	1.550.716.000	1.243.234.587	80,17	
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	13.976.637.000		13.892.774.712	99,40	37.671.350.000	51.265.730.000	50.237.101.032	97,99	
3	Program peningkatan disiplin aparatur	45.500.000		45.370.000	99,71	34.125.000	34.125.000	34.125.000	100,00	
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						50.000.000	9.000.000	18,00	
5	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	103.325.000		97.500.000	94,36		130.000.000	82.125.000	63,17	
6	Program pembangunan jalan dan jembatan	83.251.550.000		79.769.419.286	95,82	163.233.990.250	248.655.140.250	227.954.400.618	91,67	
7	Peningkatan Sarana dan prasarana kebina margaan	326.600.000		22.200.000	6,80		3.000.000.000	2.996.266.581	99,88	
8	Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya	14.607.798.000		13.946.338.800	95,47	12.663.268.500	18.836.868.500	18.276.117.393	97,02	
9	Program penyediaan dan pengelolaan air baku					441.925.000	122.525.000	67.296.210	54,92	
10	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum					33.404.785.000	34.296.385.000	31.810.643.800	92,75	
11	Program pengembangan data dan informasi					296.350.000	296.350.000	280.075.000	94,51	
12	Program pengembangan tata ruang					1.103.565.000	1.110.315.000	1.007.044.100	90,70	
10	Program pemanfaatan ruang					238.380.000	188.730.000	105.215.000	55,75	
11	Program pengendalian pemanfaatan ruang					255.280.000	265.240.000	104.287.245	39,32	
12	Program pengembangan perumahan					74.450.000	74.450.000	53.045.000	71,25	
13	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan proses pengawasan					373.590.000	379.400.000	199.206.000	52,51	
	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	295.091.000		245.192.415	83,09					
	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Perdesaan	37.612.349.606		37.103.039.275	98,65					
	Penyediaan dan pengelolaan air bersih	3.933.560.000		3.815.661.100	97,00					
	Peningkatan jalan dan penggantian jembatan	49.860.000.000		44.402.979.637	89,06					
	Pembangunan prasarana sanitasi	6.556.114		6.556.114	100,00					
	Transportasi perdesaan	231.732.000		-	-					
	T O T A L	205.059.719.130		194.098.453.789	94,65	251.037.695.643	360.255.974.750	334.459.182.566	92,84	

Lampiran 7
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DAN OUTPUT KEGIATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN 2017

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2017		REALISASI 2017		OUT PUT KEGIATAN	Vol	Sat
		APBD	APBD-P	Keuangan	%			
1	Program layanan administrasi perkantoran	1.246.636.893	1.550.716.000	1.243.234.587	80,17			
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	37.671.350.000	51.265.730.000	50.237.101.032	97,99	Revitalisasi Kantor Camat Merlung	1	Pkt
						Rehabilitasi Balai Adat Merlung	1	Pkt
						Rehabilitasi GOR Merlung	1	Pkt
						Rehabilitasi Rumah Camat Betara	1	Pkt
						Rehabilitasi Rumah Dinas Pemda	1	Pkt
						Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Merlung	1	Pkt
						Rehab Rumah Jabatan SKPD dan Asisten	12	Unit
						Rehabilitasi Drainase Kota	2	Lokasi
						Pengadaan SR IPA Rantau Badak	500	SR
						Pembangunan Lapangan Tennis	1	Unit
						Rehabilitasi Lapangan Bola Merlung	1	Unit
						Rehab Kantor ex BLHD	1	Unit
						Pembangunan Drainase Lap Bola Sungai Saren	1	Unit
						Pemb Gor Serbaguna Kuala Tungkal Lanjutan	1	Pkt
						Pemb. Pelengkap Gor Serbaguna	1	Pkt
						Pembangunan Pendopo Bumi Perkemahan	1	Pkt
						Pembangunan WC Umum WFC	1	Pkt
						Penimbunan Areal Pasar Parit I	1	Pkt
						Perencanaan	14	Pkt
						Pengawasan	15	Pkt
						Pengadaan SR	1	Pkt
						Pengadaan Tanah	3	Lokasi
3	Program peningkatan disiplin aparatur	34.125.000	34.125.000	34.125.000	100,00			
4	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		50.000.000	9.000.000	18,00			
5	Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		130.000.000	82.125.000	63,17			
6	Program pembangunan jalan dan jembatan	163.233.990.250	248.655.140.250	227.954.400.618	91,67	Beton	494	meter
						Aspal	2.900	meter
						Perkerasan Kerikil	28.425	Meter
						Jalan Baru	21.725	Meter

Lampiran :8
Standar Pelayanan Minimal
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	BIDANG	PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU PENCAPAIAN
1	Sumber Daya Air	Penyediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat	Persentase Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan Pokok minimal sehari-hari	100%	2019 (Bid. Cipta Karya, PUPR)
			Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	70%	2019 (Bid. SDA PUPR)
2	Jalan	Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat	Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten/ kota baik dan sedang	60%	2019 (Bid. Bina Mrga, PUPR)
			Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten/ kota	100%	
3	Cipta Karya	Penyediaan air minum	Persentase penduduk yang mendapat akses air minum yang aman	81,77%	2019 (Bid. Cipta Karya, PUPR)
		Penyediaan sanitasi	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	60%	
			Persentase pengurangan sampah di perkotaan	20%	
			Persentase pengangkutan sampah	70%	
			Persentase pengoperasian TPA	70%	
			Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga	50%	
		Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan	60%	
		Penangan pemukiman kumuh perkotaan	Persentase berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	10%	
4	Jasa Konstruksi	Pengembangan system informasi jasa konstruksi	Persentase tersedianya 7 (tujuh) layanan Informasi jasa konstruksi Tingkat Kabupaten / Kota Pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI)	60%	2019 (Bid. Taru Jakon, PUPR)
		Izin Usaha Jasa Konstruksi	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan Paling Lama 10 (Sepuluh) Hari Kerja setelah Persyaratan Lengkap	100%	

NO	BIDANG	PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET	WAKTU PENCAPAIAN
5	Penataan Ruang	Informasi Penataan Ruang	Persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital	100%	2019 (Bid. Taru Jakon, PUPR)
		Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	50%	

Sumber : Permen PU, Nomor:01/PRT/M/2014